

ISSN 2580 6378
E-ISSN 2580 7048



JURNAL
ASIA
PACIFIC
STUDIES

Journal of International Relations Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Kristen Indonesia

Volume 5 | Number 2 | July - December 2021

DETERMINASI PAKTA AUKUS TERHADAP KEAMANAN KAWASAN ASIA TENGGARA

Adrianus Lengu Wene

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen
Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2, 13630, Indonesia

mrandre1705@gmail.com

Abstract

This paper is intended to analyze the determinations of the AUKUS Pact on the security of the Southeast Asian region. With this aim, the focus of the analysis will lead to the attitude or foreign policy of the countries of the Southeast Asian region and ASEAN's attitude towards the determination made by the AUKUS Pact towards the ASEAN Economic Community. The constellation of international relations in the Indo Pacific shows the struggle of two great powers, namely the United States and China. China's ambition to become a hegemonic regional power is manifested in economic maneuvers through the BRI and political maneuvers through the nine dash line claim in the South Tiongkok Sea. This offensive Chinese activity poses a threat to the United States. As a reaction to China's maneuvers, the AUKUS Pact promises a balance of power as well as the potential to intensify Asia-Pacific security stability. The excesses of the constellation between the United States and China places Southeast Asian countries in a dilemma, including ASEAN which must be able to take on a role to accommodate common interests in Southeast Asia. This paper uses a historical perspective with the balance of threat theory from Stephen Walt. The findings from the paper are, first, the implications of the AUKUS Pact depend on the attitude of ASEAN member countries with two consequent models, namely creating security stability in the Southeast Asian region or causing security and peace instability; second, differences of opinion among ASEAN member countries emphasize ASEAN's inability to manage conflicts and all potential conflicts that threaten its regional security; third, the choice of balancing, bandwagoning or maintaining balance in different degrees between the United States and China is a rational choice for ASEAN member countries. The existence of the AUKUS Pact requires Southeast Asian countries to continuously develop their security mechanisms and strategies to address any potential that may occur in the future.

Keywords: AUKUS Pact, China, United States of America, ASEAN, Balance of threat

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis determinasi Pakta AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. Dengan maksud ini, fokus analisis akan bermuara pada sikap atau kebijakan luar negeri negara-negara kawasan Asia Tenggara yang berbeda dan sikap ASEAN atas determinasi yang ditimbulkan dari Pakta AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. Konstelasi hubungan internasional di Asia Pasifik menampilkan pertarungan dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Ambisi Tiongkok menjadi kekuatan regional yang hegemon termanifestasi dalam manuver ekonomi melalui BRI dan manuver politik melalui klaim *nine dash line* di Laut Tiongkok Selatan. Aktivitas Tiongkok yang ofensif ini menjadi ancaman terhadap Amerika Serikat. Sebagai reaksi terhadap manuver China, Pakta AUKUS menjanjikan *balance of power* sekaligus berpotensi mengintensifkan stabilitas keamanan Asia Pasifik. Ekses dari konstelasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok menempatkan negara-negara Asia Tenggara dalam kondisi dilematis termasuk ASEAN yang harus mampu mengambil peran untuk mengakomodasi kepentingan bersama di Asia Tenggara. Tulisan ini menggunakan perspektif historis dengan teori *balance of threat* dari Stephen Walt. Temuan dari tulisan adalah, pertama, implikasi Pakta AUKUS bergantung pada sikap antara negara-negara anggota ASEAN dengan dua model determinasi yakni menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara ataukah menyebabkan instabilitas keamanan dan perdamaian; kedua, perbedaan pendapat negara-negara anggota ASEAN mempertegas ketidakmampuan ASEAN dalam mengelolah konflik dan segala potensi konflik yang mengancam keamanan regionalnya.; ketiga, pilihan *balancing*, *bandwagoning* atau pun dengan menjaga keseimbangan dalam derajat yang berbeda antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan pilihan yang rasional bagi negara-negara anggota

ASEAN. Keberadaan Pakta AUKUS mengharuskan negara-negara Asia Tenggara secara berkelanjutan mengembangkan mekanisme dan strategi keamanannya untuk menyikapi segala potensi yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Keywords: Pakta AUKUS, China, Amerika Serikat, ASEAN, Balance of threat

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, panggung politik keamanan internasional yang sebelumnya terkonsentrasi pada kawasan Timur Tengah sebagai wilayah yang rentan konflik (*unstable peace*) kini mulai bergeser ke arah timur yang terpusat pada kawasan Asia Pasifik. Faktor paling krusial yang menyebabkan pergeseran konstelasi keamanan dunia internasional ke wilayah Asia Pasifik adalah kebangkitan China melalui *Belt Road Initiative* (BRI) yang diiringi dengan pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan modernisasi militer China. Sejak dicanangkan BRI di tahun 2013 oleh Presiden China, Xi Jinping untuk membangkitkan kembali jalur sutra maritim dan jalur sutera darat, Tiongkok menginisiasi kerjasama atau kemitraan strategis bersama negara dalam program investasi dan pembangunan jaringan infrastruktur di 152 negara yang bergabung dalam kerangka kerjasama ini (Chatzky, McBride, 2020). Dengan kemitraan BRI, strategi konektivitas yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara lain yang tersebar di Eropa, Asia, Afrika dan Oseania dapat terwujud sehingga sangat memungkinkan Tiongkok untuk menguasai perdagangan dunia.

Melihat kebijakan geopolitik Tiongkok yang progresif, Bank Dunia memandang bahwa BRI Tiongkok merupakan suatu upaya ambisius Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama regional dan konektivitas antar benua (World Bank, 2018). Inisiatif ini bertujuan memperkuat infrastruktur, perdagangan, dan investasi antara Tiongkok dengan 84 negara yang diatur dalam 7 koridor BRI. Inisiatif ini mewakili dua pertiga dari populasi global, 40-50% dari produk nasional global bruto, dan 75% dari sumber daya energi (Institute for Essential Services Reform, 2019). Total investasi untuk infrastruktur di bawah BRI diperkirakan 1 triliun hingga 8 triliun dollar amerika dan terdapat 7000 proyek BRI yang dikontrak pada tahun 2017 (Institute for Essential Services Reform, 2019). Dengan inisiatif ini, Tiongkok memperkuat kekuatan ekonominya dan menjadi salah satu negara hegemon di kawasan Asia Pasifik.

Secara faktual, kebijakan BRI Tiongkok ini menunjukkan kapabilitas Tiongkok sebagai kekuatan baru di dunia yang akan menjadi rival Amerika Serikat dan membentuk dunia internasional yang bipolar (Basit, 2021). Indikasi ini terlihat jelas dengan sikap dan tindakan Tiongkok yang semakin agresif dalam interaksinya dengan negara-negara lain baik pola interaksi Tiongkok sebagai rival atau musuh maupun sebagai mitra kerjasama BRI. Sebagai mitra dalam kerjasama BRI, terlihat sikap agresif yang dipertontonkan Tiongkok dengan jebakan utangnya (*debt trap*) kepada negara-negara yang melakukan pinjamannya seperti Sri Lanka, Laos, Myanmar, Kamboja. Akibat dari jebakan hutang (*debt trap*) China, Sri Lanka harus menyerahkan Pelabuhan Hambantota untuk dikuasai oleh Tiongkok selama 99 tahun (Jones, Hameiri, 2020). Myanmar juga diharuskan untuk menggunakan mata uang Tiongkok yakni renminbi sebagai alat pembayaran dari transaksi perdagangan dengan Tiongkok di tahun 2022 (Xuanmin, 2021).

Dengan mengharuskan negara-negara yang tidak mampu melakukan pengembalian pinjaman untuk memberlakukan renminbi sebagai alat pembayaran transaksi dagang, Tiongkok secara implisit bertujuan untuk mengurangi atau memperlemah kekuatan dan posisi dollar amerika yang selama ini menjadi standar dan alat pembayaran perdagangan internasional

di setiap negara yang dikendalikannya. Sebagai rival atau musuh, Tiongkok semakin memperlihatkan arogansi dan manuver politiknya dengan memicu ketegangan dengan negara-negara di sekitarnya. Konflik Laut China Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Indonesia, Brunei Darusalam, Malaysia, Vietnam dan Thailand adalah fakta paling empiris selain konflik Tiongkok dengan Taiwan untuk menunjukkan agresivitas dan arogansi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan geopolitik BRI Tiongkok yang ambisius didukung oleh modernisasi militer terutama pengembangan senjata nuklir untuk mengamankan kepentingan strategis Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Ketegangan dan konflik yang diciptakan Tiongkok terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik menimbulkan respon dari berbagai negara terutama Amerika Serikat yang merupakan rival Tiongkok dalam pertarungan politik dunia (Syahrin, 2018). Sikap reaksioner yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya terhadap Tiongkok terus bertransformasi. Dari kebijakan *Pivot to Asia* yang dijalankan oleh Barack Obama, *Trans Pacific Partnership*, *American First* oleh Donald Trump hingga kebijakan yang paling agresif saat ini yakni *AUKUS Pact* memperlihatkan upaya serius Amerika Serikat untuk membendung penyebaran pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Pakta AUKUS merupakan perjanjian pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Australia dan Inggris dalam proyek pengadaan kapal selam nuklir bagi Australia dengan tujuan implisit yakni membendung pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik (Sinav, 2021). Dengan adanya pakta pertahanan ini, secara definitif Australia dimampukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya untuk menjamin stabilitas keamanan kawasan dan perdamaian.

Kehadiran Pakta AUKUS menimbulkan pro dan kontra dalam politik keamanan Asia Pasifik. Tiongkok dan Uni Soviet menilai bahwa keberadaan Pakta AUKUS akan menciptakan instabilitas keamanan kawasan dan mengganggu perdamaian (Sanuhaji, 2021), sedangkan Taiwan, berpandangan bahwa keberadaan Pakta AUKUS mampu memberikan jaminan keamanan dan perdamaian kawasan serta mampu membendung sikap agresif Tiongkok yang berpotensi menciptakan konflik kawasan yang berkepanjangan (Kompas, 2021). Sebagai pakta pertahanan yang dinilai paling agresif dengan menghadirkan modernisasi militer khususnya kapal selam bertenaga nuklir, secara definitif memberikan implikasi tersendiri bagi keamanan kawasan Asia Tenggara. Faktor utamanya adalah dalam kondisi dan situasi di ambang kemungkinan perang terbuka, kawasan Asia Tenggara akan menjadi sangat terbuka bagi pertarungan antara Tiongkok berhadapan dengan Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris.

Pengadaan kapal selam nuklir bagi Australia dalam Pakta AUKUS dipandang akan semakin memanasakan konflik Tiongkok dengan Amerika Serikat bersama sekutunya serta menghadirkan kembali suasana perang dingin dengan modernisasi senjata nuklir dari kedua belah pihak. Dengan demikian, kawasan Asia Tenggara tidak lagi menjadi kawasan bebas dari nuklir sebagaimana yang termaktub dalam Traktat SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*) tahun 1995 yang menetapkan komitmen bersama negara-negara anggota ASEAN untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya (Kuswardini, 2018). Kawasan Asia Tenggara akan terdampak dari keberadaan Pakta AUKUS dan konflik berkepanjangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Melihat krusialnya keberadaan Pakta AUKUS dalam konflik Amerika Serikat dan Tiongkok bagi keamanan kawasan Asia Tenggara, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus analisis adalah bagaimana implikasi Pakta AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara.

1.2. Rumusan Masalah

Konstelasi Asia Pasifik menunjukkan ketegangan antara dua kekuatan besar yakni Tiongkok dan Amerika Serikat yang didukung oleh mitra strategisnya yakni Inggris dan Australia. Konsekuensi dari manuver politik Tiongkok yang termanifestasikan melalui klaim *nine dash line* atas Laut Tiongkok Selatan, penguatan konektivitas ekonomi lewat *Belt Road Initiative* (BRI) serta peningkatan kekuatan militer Tiongkok menimbulkan *contra reaction* Amerika Serikat melalui Pakta AUKUS. Kehadiran Pakta AUKUS dengan modernisasi kapal selam nuklir bagi Australia dan pengintensifan kekuatan pertahanan dan keamanan menempatkan kawasan Asia Tenggara dalam kondisi dilematis. Potensi ancaman terhadap keamanan dan perdamaian Asia Tenggara semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan kembalinya nuansa perlombaan senjata nuklir ala Perang Dingin. Sebagai kawasan yang sangat terbuka di Asia Pasifik, Asia Tenggara sangat berpotensi mengalami instabilitas keamanan. Atas dasar rumusan masalah ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinasi Pakta AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara dan bagaimana sikap negara-negara kawasan Asia Tenggara serta sikap ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara.?

1.3. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis (1) determinasi Pakta AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara; (2) sikap negara-negara kawasan Asia Tenggara serta sikap ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi secara akademis yakni sebagai kajian terhadap pengetahuan tentang Pakta AUKUS dan determinasi yang ditimbulkannya dalam telaah teori hubungan internasional dan perspektif historis. Secara praktis, penelitian ini juga berkontribusi sebagai bahan referensi pembelajaran studi keamanan di Asia Tenggara serta rekomendasi argumentatif bagi *stakeholder* dalam pendalaman kebijakan bagi permasalahan keamanan kawasan Asia Tenggara.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori *Balance of Threat*

Teori keseimbangan ancaman (*balance of threat*) muncul pada 1987 dalam karya Stephen Walt yakni *The Origin of Alliances*. Walt berpandangan bahwa ide-ide negara tentang keamanan tidak ditentukan oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kekuatan melainkan ditentukan oleh ancaman yang dirasakan (Walt, 1991). Menurut Walt, negara mengasosiasikan keamanan mereka sendiri dengan ancaman yang dirasakan dan berusaha untuk menyeimbangkan ancaman melalui hubungan internasional (Walt, 1990). Dalam hal ini, terdapat empat anasir yang mendefinisikan ancaman yang dirasakan oleh negara-negara antara lain, *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive capabilities*, dan *offensive intentions* (Anshori, 2020). *Aggregate power* mengacu pada total populasi negara, industri, ekonomi, dan sumber daya yang dimiliki suatu negara, *geographic proximity* mengacu pada situasi di mana kemampuan negara dalam memproyeksikan kekuatan menurun seiring dengan jarak. *Offensive*

capabilities merujuk pada kemampuan negara untuk mengancam kedaulatan atau integritas teritorial negara lain dengan biaya yang dapat diterima, sedangkan niat yang dirasakan oleh negara adalah keadaan agresif yang mengancam negara tersebut (Keohane, 1988).

Sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, perilaku negara mengacu pada dua pendekatan yakni *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* berarti bersekutu dengan negara lain untuk melawan ancaman yang ada sedangkan *bandwagoning* mengacu pada upaya menyelaraskan dengan sumber bahaya atau ikut bersekutu dengan negara yang menjadi sumber ancaman. Menurut Waltz, karena kekuasaan adalah sarana bukan tujuan, negara lebih memilih untuk menggabungkan dua kondisi yang lebih lemah sehingga ancaman menjadi hal penting dalam menentukan perilaku negara dan pembentukan aliansi. Ini berarti negara membentuk aliansi untuk mencegah kekuatan yang relatif lebih kuat mendominasi mereka. Dengan kata lain, negara-negara membentuk aliansi atau koalisi ketika negara lainnya menjadi ancaman. Pembentukan aliansi ini dilakukan dengan dua cara yakni pertama, ketika kelangsungan hidup negara terancam dan ingin mengekang niat agresif lawan; kedua, ketika keterlibatan negara dalam aliansi membuatnya lebih kuat dan berada dalam posisi untuk mendominasi aliansi (Walt, 1979).

3. Objek dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan data-data dan fakta-fakta dengan narasi deskriptif kemudian melakukan analisis mendalam terhadap data ataupun fakta yang telah dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku, jurnal, laporan penelitian dan website yang membahas tentang Pakta AUKUS, China, Amerika Serikat, ASEAN dan keamanan Asia Tenggara. Subjek dari penelitian ini adalah China, Amerika Serikat, negara-negara kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sebagai organisasi regional kawasan, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah PAKTA AUKUS, keamanan Asia Tenggara dan sikap atau kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara dan ASEAN. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan yakni melakukan display data tentang Pakta AUKUS dan sikap negara-negara Asia Tenggara, dilanjutkan dengan tahapan interpretasi data yakni data tersebut ditafsirkan dalam konteks dan korelativitasnya dengan teori, selanjutnya dilakukan tahapan komparasi data yakni semua data yang terkumpul dibandingkan satu persatu untuk ditemukan hasilnya sehingga dapat dianalisis, serta di tahap terakhir dilakukan penyajian hasil tentang implikasi Pakta AUKUS terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kehadiran Pakta Aukus di Kawasan Asia Pasifik

Pada tahun 2021 tepatnya tanggal 15 September, dunia internasional dikejutkan dengan aliansi militer Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang membentuk perjanjian pertahanan dan keamanan trilateral yakni *AUKUS Pact*. Pakta ini secara resmi menjadi *warning* bagi kawasan Asia Pasifik tentang peningkatan kerjasama militer antara tiga negara anglosaxon pada level keamanan yang tinggi. Kehadiran pakta ini dilatarbelakangi dengan kenyataan kompleksitas masalah yang muncul di Asia Pasifik yang berpotensi akan berimplikasi luas bagi seluruh kawasan sehingga mengharuskan perlunya kemitraan keamanan strategis untuk menghadirkan keamanan dan stabilitas (Swanstrom, Jagannath, 2021). Latar belakang ini dengan jelas menguraikan tujuan Pakta AUKUS yakni meningkatkan jaringan kemitraan

strategis yang berkembang di kawasan IndoPasifik termasuk dengan ASEAN. Pakta ini juga memberikan utilitas bagi Australia untuk memperoleh teknologi untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Kehadiran Pakta AUKUS di Asia Pasifik memperlihatkan adanya pergeseran geopolitik yang mendalam. Berdasarkan pakta ini, tiga kekuatan anglosaxon menyatakan kerja sama dalam membangun armada enam kapal selam bersenjata nuklir untuk Angkatan Laut Australia. Pakta ini mencakup kerja sama pertahanan utama di berbagai teknologi militer termasuk *cyber capabilities*, *artificial intelligence*, *quantum technologies*, dan *additional undersea capabilities* (White House, 2021). Sebagai negara dengan kemampuan militer yang kuat, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris berkomitmen untuk menjaga kawasan Asia Pasifik yang bebas, terbuka dan damai dari ancaman pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Dengan komitmen ini, Pakta AUKUS menciptakan kontroversi dan polemik di dunia internasional. Tak hanya Tiongkok yang bereaksi keras terhadap Pakta AUKUS, Perancis, negara-negara anggota NATO lainnya serta negara-negara anggota ASEAN turut memberikan reaksi keras terhadap pembentukan Pakta AUKUS.

Kesepakatan kapal selam nuklir di bawah AUKUS ini turut menimbulkan keretakan hubungan antara Australia dan Prancis dengan dibatalkannya kontrak untuk membangun kapal selam serang konvensional untuk Angkatan Laut Australia (Erickson, 2021). Pembatalan kontrak ini merupakan pilihan rasional Australia untuk memperoleh utilitas yang lebih besar bagi peningkatan pertahanan dan keamanannya dalam fungsi *monitoring* kawasan dengan diberikannya kapal selam nuklir oleh Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini juga mengartikan bahwa Australia secara tegas menunjukkan keberpihakannya terhadap Amerika Serikat dan Inggris yang selama ini jelas telah menjadi sekutu anglosaxonnya. Keberpihakan Australia ini menjawab tanda tanya dari dunia internasional tentang sikapnya yang selama ini dinilai ambivalensi karena hubungan ekonominya yang terjalin baik dengan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir.

Pakta AUKUS menandakan kehadiran aliansi militer yang kuat di kawasan Asia Pasifik. Meskipun pakta ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan jaringan kemitraan yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik termasuk dengan ASEAN, tetapi merujuk pada perkembangan geopolitik di Asia Pasifik selama beberapa tahun terakhir, jelas bahwa Pakta AUKUS mengandung kepentingan geopolitik Amerika Serikat yang sangat strategis. Kepentingan Amerika Serikat bersama Australia dan Inggris adalah mempertahankan supremasi militer yang terancam akibat perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Dari rangkaian konflik yang terjadi, terlihat bahwa kompleksitas masalah yang terjadi di kawasan Asia Pasifik bermula dari arogansi politik Tiongkok yang mengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari teritorialnya dengan mengacu pada *Nine Dash Line*. Arogansi ini terus berlanjut dengan ketegangannya dengan Taiwan dalam klaim kedaulatan Taiwan, ketegangan dengan Jepang terkait klaim Kepulauan Senkaku, ketegangan dengan India terkait perbatasan di Himalaya, jebakan hutang (*debt trap*) yang dilakukan Tiongkok terhadap negara-negara seperti Sri Lanka serta sanksi perdagangan yang diberikan Tiongkok terhadap negara-negara seperti Australia. Atas dasar arogansi Tiongkok dan melihat *sphere of influence* Tiongkok dengan tujuan menjadi kekuatan hegemon di kawasan Asia Pasifik, Pakta AUKUS berkepentingan untuk mencegah pengaruh Tiongkok semakin meluas di Asia Pasifik yang mampu menciptakan bentuk kolonialisme baru di kawasan Asia Pasifik. Pakta AUKUS juga menunjukkan peningkatan kekuatan militer yang lebih intensif dari Amerika Serikat, Australia dan Inggris untuk memperkuat dan mempertahankan supremasi militernya di kawasan Asia Pasifik (Saha, 2021).

Signifikansi utama AUKUS terletak pada pesan politiknya. Untuk waktu yang lama, Amerika Serikat memiliki keraguan tentang bagaimana mengatasi kebangkitan China. Amerika Serikat dihadapkan pada dua pilihan yakni memaksa Tiongkok untuk menerima tatanan dunia

global yang dipimpin Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan dunia (unipolar) ataukah mengakui dan menerima Tiongkok sebagai kekuatan dunia baru dan bersama-sama dengan Amerika Serikat mengelola tatanan dunia global. Dari kedua pilihan ini, terlihat juga dengan jelas sikap politik Amerika Serikat yakni mencegah Tiongkok menjadi kekuatan global. Pilihan ini merupakan sikap rasional Amerika Serikat dalam melihat kebangkitan Tiongkok melalui manuver militernya.

Pakta AUKUS mencerminkan dua hal penting dalam kebijakan Amerika Serikat. Pertama, Pakta AUKUS merupakan sikap tegas dari logika keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap Asia Pasifik. Dalam logika *balance of power* ini, Amerika Serikat membentuk aliansi militer dengan dua sekutu Anglosaxon terpentingnya untuk melawan China. Kedua, pakta ini menggarisbawahi bahwa pendekatan Amerika Serikat dalam membendung Tiongkok akan memanfaatkan teknologi pertahanannya dan sekutunya terutama Australia yang secara geografis berada di kawasan Asia Pasifik.

Selain kepentingan, hal penting lainnya dari Pakta ini adalah sifat luar biasa dari perjanjian ini. Sifat ini adalah *Brinkmanship Principle* yang secara aktif mendorong situasi ketegangan ke ambang konflik aktif dan memaksa lawan untuk mundur dan membuat konsesi. Sifat ini mengacu pada meningkatnya kerentanan Amerika berhadapan langsung dengan kekuatan angkatan laut Tiongkok yang semakin kuat di wilayah Asia Pasifik. Kebangkitan *People's Liberation Army Navy* (PLAN) di wilayah tersebut menunjukkan tanda yang signifikan sebagai ancaman bagi Amerika Serikat terutama negara-negara di Asia Pasifik. Dari angkatan laut pesisir kecil pada 1980-an dan 1990-an, PLAN kini telah menjelma sebagai angkatan laut terbesar di dunia (Shugart, 2021). Program pembuatan kapal Tiongkok antara tahun 2016 dan 2020, hampir 50% lebih banyak dari galangan kapal Amerika (Congressional Research Service, 2021). Tanpa tindakan korektif, PLAN akan dapat sepenuhnya mendominasi Indo-Pasifik pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, AUKUS juga secara implisit menunjukkan kerentanan Amerika Serikat yang berkembang di kawasan Asia Pasifik.

Pakta AUKUS adalah contoh pertama dari pembentukan aliansi sejak akhir Perang Dingin yang secara eksplisit menargetkan China. Dengan menyetujui untuk mentransfer teknologi militer strategis yang paling berharga yakni kapal selam nuklir ke Australia, Amerika Serikat telah menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa meskipun stabilitas regional dan tujuan normatif non-proliferasi adalah prioritasnya, akan tetapi Amerika Serikat tetap menunjukkan kekuatannya dalam mempertahankan supremasi militernya dalam persaingan dengan Tiongkok di Asia Pasifik. Pakta AUKUS menggarisbawahi bahwa dalam persaingan kekuatan besar, Amerika Serikat tidak akan membiarkan Tiongkok mendominasi tanpa perlawanan. Baik teknologi maupun kehadiran sekutu memberikan keunggulan signifikan bagi Amerika Serikat. Bahkan ketika PLAN dapat menurunkan lebih banyak kombatan angkatan laut, angkatan laut Amerika Serikat masih memiliki keunggulan teknologi yang mutakhir. Dengan Pakta AUKUS, Amerika Serikat berupaya membatasi ruang gerak PLAN Tiongkok dalam menguasai perairan Asia Pasifik dan menetralkan kemungkinan Tiongkok mengerahkan senjata nuklirnya.

4.2. Determinasi Pakta AUKUS Terhadap Keamanan Asia Tenggara

Pakta AUKUS dengan nuansa kepentingan Amerika Serikat, Inggris dan Australia di baliknya tidak hanya berimplikasi pada Tiongkok ataupun kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, tetapi secara geopolitik dan geostrategi membawa implikasi yang mendalam bagi kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentunya berkaitan dengan keamanan Asia Tenggara sebab Pakta AUKUS akan bersinggungan langsung dengan kawasan Asia Tenggara dalam upaya preventifnya yakni membendung perluasan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik. Sebagai kawasan yang berada di tengah ketegangan antara dua kutub kekuatan besar yakni Tiongkok

dan mitra trilateral AUKUS yakni Australia, Amerika Serikat dan Inggris tentunya menimbulkan kecemasan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dimungkinkan dengan melihat efek yang ditimbulkan oleh Pakta AUKUS. Kecemasan ini merupakan sesuatu yang wajar sebab adanya Pakta AUKUS akan meningkatnya persaingan militer dari Tiongkok dan Amerika Serikat dan sekutunya dan akan semakin mempersulit sikap perhitungan politik luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Strangio, 2021).

Implikasi yang paling konkrit adalah ambivalensi sikap dan politik luar negeri negara-negara anggota ASEAN terhadap Pakta AUKUS. Hal ini dikarenakan dualisme sikap yang ditunjukkan negara-negara anggota ASEAN yang secara ekonomi cenderung berkiblat ke Tiongkok namun secara politik keamanan masih cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pandangan politik anggota ASEAN dalam merespon keberadaan Pakta AUKUS. Negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia memandang bahwa adanya Pakta AUKUS akan memicu perlombaan senjata nuklir sebagaimana yang terjadi pada Perang Dingin dan akan berdampak pada instabilitas keamanan dan perdamaian kawasan Asia Tenggara serta merusak nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh secara signifikan di Asia Tenggara. Hal ini nampak dari tanggapan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang prihatin atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan (Jailani, 2021). Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, Filipina dan Singapura menyatakan dukungan terhadap Pakta AUKUS yang dipandang dapat meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga tampak pada pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin yang menyatakan bahwa peningkatan kemampuan sekutu dekat Filipina tersebut adalah untuk memulihkan dan menjamin keseimbangan daripada mengacaukannya (Departement of Foreign Affairs Republic of the Philippines, 2021)

Perbedaan sikap negara-negara anggota ASEAN terhadap kehadiran Pakta AUKUS tentunya berimplikasi juga pada kemampuan sentralitas ASEAN dalam mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi Pakta AUKUS. Implikasi yang buruk bagi ASEAN adalah terjepit di antara meningkatnya kerjasama ekonomi dan kedekatan diplomatik dengan Tiongkok dan di lain masih membutuhkan sistem intrusif Amerika Serikat dalam upaya menghadapi Tiongkok di konflik Laut Tiongkok Selatan. Dilema dan perbedaan sikap negara-negara anggota ASEAN mengakibatkan hilangnya peran sentral agensi ASEAN dalam persoalan Asia Pasifik terutama berkaitan dengan keamanan regionalnya.

Akibat ketidakmampuan dan ketidaseragaman pendapat negara-negara anggota ASEAN dalam menyikapi secara tegas selanjutnya berimplikasi terhadap *status quo* ASEAN. Pertama, ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok membuat negara-negara anggota ASEAN hanya memiliki sedikit sumber daya dan *bargaining power* selain mematuhi keinginan dan kepentingan China, seperti halnya sengketa Laut China Selatan meskipun banyak negara-negara anggota ASEAN memiliki kepentingan teritorial langsung yang dipertaruhkan. Kedua, ketidakefektifan ASEAN untuk menghadapi paksaan ekonomi dan militer Tiongkok semakin membenarkan pandangan Amerika Serikat dan sekutunya bahwa ASEAN tidak memiliki kemampuan untuk mampu mengatasi agresivitas China. Oleh karena itu, persaingan ekonomi dan militer yang berkembang di Asia Pasifik membuat negara-negara ASEAN semakin terisolasi bila tidak mampu memberikan sikap yang tegas terhadap Pakta AUKUS dan ketegangan yang telah berlangsung lama.

Terlepas dari pro kontra apakah Pakta AUKUS menciptakan stabilitas ataupun instabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara, implikasi nyata yang dapat terjadi dengan adanya Pakta AUKUS antara lain, pertama, mengingat kapal selam nuklir menjadi senjata utama pilihan di Asia Pasifik, Asia Tenggara akan menjadi wilayah operasi utama dari pakta tersebut. Kepentingan maritim negara-negara Asia Tenggara yang sudah terancam oleh operasi angkatan laut dan penangkapan ikan Tiongkok yang agresif di Laut China Selatan akan semakin

diperumit dengan rute lintasan kapal selam nuklir yang tentunya akan melewati perairan Asia Tenggara. Kedua, respon ASEAN yang ambivalen terhadap agresivitas Tiongkok dan perbedaan pendapat intra ASEAN dalam menghadapi kekuatan Tiongkok telah menciptakan keretakan di antara negara-negara Asia Tenggara. Ini akan semakin mendilematisasi sikap politik luar negeri negara-negara anggota ASEAN dalam menentukan posisinya di tengah ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat yang semakin memanas, ASEAN menghadapi perpecahan serius di dalamnya. Ketiga adalah Pakta AUKUS akan secara gradual mengurangi ketergantungan dan sentralitas ASEAN dan lembaga yang dipimpin ASEAN seperti ASEAN Forum Regional (ARF) dalam mengelola keamanan kawasan Asia Tenggara. Dengan kata lain, ASEAN kehilangan sentralitas perannya dalam menjadi aktor utama guna mengatasi konflik Tiongkok dan Amerika Serikat yang jelas akan melibatkan kawasan Asia Tenggara sebagai medan konflik.

Dalam perspektif historis, kondisi keamanan yang muncul pada periode pasca Perang Dingin mengharuskan ASEAN untuk mengembangkan mekanisme pertahanan dan keamanan regionalnya. Merujuk pada pendekatan historis, Asia Tenggara telah mengalami sejarah buruk dengan adanya Perang Dingin. Pertarungan dua ideologi besar yakni liberalisme yang diusung oleh Amerika Serikat dan komunisme yang diusung oleh Uni Soviet saat itu telah menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan *proxy* dari pertarungan kedua negara tersebut. Efek domino yang ditimbulkan dalam eskalasi Perang Dingin menjadi faktor utama pembentukan SEATO untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara.

Dalam Perang Dingin yang menghadirkan perlombaan senjata nuklir tersebut mengharuskan ASEAN untuk mendeklarasikan *ASEAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) tahun 1971 yang selanjutnya menggagasi pembentukan *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) atau Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (The Nuclear Threat Initiative, 2020). Merujuk pada peristiwa historis ini, ASEAN perlu menghadirkan mekanisme pertahanan dan keamanan regional baru untuk semakin meningkatkan kapasitas kelembagaannya sehingga mampu menjawab tantangan keamanan yang muncul saat ini yakni keberadaan Pakta AUKUS dalam ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat bersama sekutunya. Dengan semakin memanasnya ketegangan Amerika Serikat dan China, negara-negara anggota ASEAN harus mewaspadai manuver Tiongkok khususnya militerisasinya di Laut Tiongkok Selatan dan aksi balasannya terhadap Pakta AUKUS. Pada saat yang sama juga, negara-negara anggota ASEAN juga harus mewaspadai keberlanjutan dari mekanisme Pakta AUKUS yang telah menghadirkan nuansa Perang Dingin sebagai tanggapan langsung terhadap pendekatan Tiongkok yang lebih tegas. Mekanisme pertahanan dan keamanan regional yang baru perlu mengedepankan kepentingan bersama ASEAN dengan terus memantau perkembangan konflik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat serta negara-negara lainnya untuk mengakhiri sikap ambivalensi yang selama ini dituduhkan kepada negara-negara anggota ASEAN.

Melihat konflik Amerika Serikat dan Tiongkok serta hadirnya Pakta AUKUS sebagai perjanjian pertahanan dan keamanan trilateral di Asia Pasifik, terdapat dua pilihan pendekatan dalam kerangka teori *balance of threat* untuk mengakhiri sikap ambivalensi dan *status quo* dari kecemasan terciptanya instabilitas keamanan di Asia Tenggara. Pertama, melakukan *balancing* atau membentuk aliansi di luar Tiongkok dan Amerika Serikat. Artinya bahwa negara-negara anggota ASEAN saling mengikatkan diri untuk beraliansi dengan tujuan yang sama terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat bersama sekutunya yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan regionalnya. Dengan melakukan *balancing* sebagaimana Gerakan Non Blok di masa lalu, negara-negara anggota ASEAN mampu untuk mempertahankan diri atau dan menjamin keseimbangan kekuatan termasuk menekan dominasi kekuatan Tiongkok dan Amerika Serikat agar dominasi tersebut tidak menjadi terlalu kuat dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan.

Sebagai kawasan yang secara geografis terletak di pusat Asia Pasifik, ASEAN yang mewadahi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dituntut harus mampu memainkan kebijakan geostrategisnya untuk menekan atau membatasi penyebaran pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara dan mereduksi konflik antara kedua negara yang terus berlanjut. Dalam pilihan ini, negara-negara ASEAN mampu menciptakan *balance of power* atau keseimbangan kekuatan antara dua kekuatan besar yang berkonflik dan sekaligus mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah Asia Tenggara tanpa menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu kekuatan tersebut.

Kedua, dengan melakukan *bandwagoning*, yakni bekerjasama dengan salah satu negara yang dianggap sebagai sumber ancaman yaitu negara yang dinilai menjadi ancaman paling berbahaya karena mempunyai kekuatan yang besar dan melampaui kekuatan dari negara-negara lain yang bekerjasama dengannya. Artinya bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat melakukan kerjasama atau berpihak baik kepada Tiongkok maupun Amerika Serikat yang dipandang sebagai sumber ancaman paling berbahaya. Level ancaman yang menjadi indikator keberpihakan ini mencakup agregasi kekuatan (kapabilitas militer, teknologi, sumber daya), kedekatan geografi (*geography proximity*), kemampuan menyerang (*offensive capability*), dan tingkat kemampuan agresivitas dari negara yang dinilai sebagai ancaman (*offensive intension*) (Walt, 1990).

Bila merujuk pada fakta yang berkembang di kawasan Asia Tenggara terutama dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, dapat dipandang bahwa negara-negara anggota ASEAN cenderung melakukan *bandwagoning* dengan Amerika Serikat yang ikut berperan mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam konflik teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Perselisihan yang dimulai Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN di Laut Tiongkok Selatan sangat memungkinkan untuk memberikan pilihan yang rasional bagi ASEAN untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan Tiongkok meskipun rezim kerjasama ekonomi semakin menguat beberapa tahun terakhir antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. Bila pilihan ini yang diambil, posisi dan pengaruh Tiongkok semakin terancam sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Tak bisa diabaikan bahwa kehadiran Pakta AUKUS telah memanaskan konflik antara Amerika Serikat dengan China. Imbas dari konflik ini, keamanan Asia Tenggara akan terancam mengalami instabilitas. Oleh sebab itu, dua pilihan pendekatan di atas merefleksikan *regional security complex*. Ini mengartikan bahwa keamanan masing negara-negara berhubungan erat satu sama lain sehingga keamanan nasional tidak mungkin tercapai tanpa memperhitungkan keamanan regional (Buzan, Waever, 2003). Meskipun terdapat interdependensi antar negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan keamanan regional yang dapat berujung pada stabilitas keamanan nasional masing-masing negara, bukan berarti bahwa keadaan yang harmonis akan tercapai. Sangat dimungkinkan untuk selalu terdapat pertentangan sikap antara negara-negara anggota ASEAN sebab hubungan dalam kawasan Asia Tenggara akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perimbangan kekuatan, aliansi dengan negara lain serta masuknya suatu kekuatan eksternal di dalam kawasan tersebut.

Oleh sebab itu, negara-negara anggota ASEAN yang didorong oleh kepentingan geostrategi wajib berupaya untuk menjaga keseimbangan dalam derajat yang berbeda antara Amerika Serikat dan China. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara ASEAN memiliki kebebasan untuk menuai keuntungan ekonomi dari hubungan mereka dengan Tiongkok sambil mendapatkan keuntungan dari kehadiran Amerika Serikat dalam keamanan kawasan. Meskipun ini adalah pilihan yang oportunistik, namun dampak dari posisi yang bernuansa seperti ini akan membuat ASEAN semakin sulit untuk berbicara dengan satu suara sebagai entitas tunggal bersama di kawasan Asia Tenggara. Implikasi negatif yang sangat mungkin terjadi dari Pakta AUKUS harus disikapi secara lugas dan tegas oleh negara-negara anggota ASEAN. Pilihan lainnya adalah apakah mengambil kebijakan sebagai satu entitas regional ASEAN ataukah

mengambil sikap politik luar negeri secara personal sebagai negara yang otonom tanpa perlu sentralitas ASEAN dalam menyikapi implikasi Pakta AUKUS.

5. Kesimpulan

Konflik yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan serangkaian tindakan politik dan manuver militer yang agresif dan arogan telah menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat persaingan kekuatan Amerika Serikat dan China. Tiongkok berupaya untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Pasifik sedangkan di sisi lain, Amerika Serikat berupaya mempertahankan supremasi hegemoninya di Asia Pasifik. Konflik yang terus berlanjut antara kedua negara memantik terbentuknya Pakta AUKUS sebagai respon trilateral Amerika Serikat, Inggris dan Australia terhadap agresivitas militer dan politik Tiongkok di kawasan Asia Pasifik terutama dalam kasus konflik Laut Tiongkok Selatan, konflik klaim kedaulatan Taiwan dan berbagai konflik lainnya termasuk kebijakan *debt trap* yang dijalankan China. Kehadiran Pakta AUKUS jelas menimbulkan pro kontra di dunia internasional terutama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang secara geografi akan bersinggungan langsung dengan konflik Tiongkok dan Amerika Serikat. Perbedaan pendapat antara negara-negara anggota ASEAN tentang Pakta AUKUS terhadap keamanan Asia Tenggara mengacu pada determinasinya yakni menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara maupun sebaliknya menyebabkan instabilitas keamanan dan perdamaian dengan memicu perlombaan senjata nuklir.

Terlihat bahwa perbedaan pendapat negara-negara anggota ASEAN mempertegas ketidakmampuan ASEAN dalam mengelolah konflik dan segala potensi konflik yang mengancam keamanan regionalnya. Sikap ambivalensi ini jelas akan menghilangkan sentralitas ASEAN yang seharusnya menjadi poros utama dalam pengaturan keamanan regionalnya termasuk upaya reduksi konflik di kawasan Asia Tenggara serta semakin membuka ruang intervensi Amerika Serikat ataupun Tiongkok di dalam kawasan ini. Terlepas dari akan seperti apa upaya negara-negara anggota ASEAN dalam menyikapi Pakta AUKUS, satu hal yang pasti bahwa kawasan Asia Tenggara akan terus diganggu oleh sejumlah ketegangan yang bersumber dari Tiongkok dan Amerika Serikat bersama sekutunya Inggris dan Australia di masa mendatang. Tekanan yang mungkin muncul dari Pakta AUKUS dan Tiongkok pada masa mendatang merupakan tantangan tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN sebab tekanan tersebut dapat melemahkan mekanisme keamanan di kawasan Asia Tenggara untuk menghadirkan keseimbangan kekuatan dan mencapai resolusi untuk mengatasi tantangan keamanan secara kolektif. Oleh sebab itu, negara-negara anggota ASEAN perlu menentukan sikap politik luar negerinya baik secara personal maupun kolektif sebagai satu entitas ASEAN sehingga keamanan regionalnya dapat terjaga. Pilihan *balancing*, *bandwagoning* ataupun dengan menjaga keseimbangan dalam derajat yang berbeda antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan pilihan yang rasional bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menunjukkan eksistensinya di tengah pertarungan Amerika Serikat dan Tiongkok pada lanskap geografinya. Keberadaan Pakta AUKUS tentunya akan mempengaruhi dinamika negara-negara anggota ASEAN di lingkungan keamanan kawasan Asia Tenggara di masa mendatang. Negara-negara anggota ASEAN secara berkelanjutan perlu mengembangkan mekanisme dan strategi keamanannya untuk menyikapi segala potensi yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

- Buzan, Barry, Ole Waever. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Sinav, Kamile Betul. (2021). Aukus Security Agreement from Parties and Non-parties. *Book Chapter of Rising Tiongkok New Order in the Asia Pacific*. Ankara: Foreign Policy Institute.
- Swanstrom Niklas, Jagannath Panda. (2021). AUKUS – A Setback to Europe’s Indo-Pacific Outreach?. *Book Chapter of AUKUS: Resetting European Thinking on Indo-Pacific?* Lithuania: Institute for Security and Development Policy.
- Syahrin, M Najeri Al. (2018). *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Depok: Komojoyo Press.
- Walt, Stephen. (1990). *The Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press.
- Waltz, Kenneth. (1979). *Theory of International Politics*. London: Addison-Wesley Publishing Company

Jurnal

- Anshori, Muhammad Fikry.(2020). Balance of Threat of the Quadrilateral Security Dialogue towards China’s Presence in the South TiongkokSea. *AEGIS*, Vol. 4 No. 1, March 2020, hal.41.
- Keohane, Robert (1988). Alliances, Threats and the Uses of Neorealism. *International Security Summer*, Vol.13.No.1., hal. 169-176.
- Kuswardini, Seftina. (2018). Asean Dalam Mendorong Negara Permanent 5 Untuk Mengaksesi Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ). *Islamic World and Politics Journal*, Vol.2, No.1 January-June 2018, hal. 268.
- Walt, Stephen. (1991). The Renaissance of Security Studies. *International Security Quarterly*, hal. 211.

Research Paper

- Jones, Lee, Shahar Hameiri. (2020). Debunking the Myth of ‘Debt-trap Diplomacy’ How Recipient Countries Shape China’s Belt and Road Initiative. Research Paper of Asia-Pacific Programme.
- Saha, Pramesha. (2021). Australia Ponders a Win. Book Chapter of AUKUS and the Indo-Pacific: Stakeholders Weigh their Wins and Losses. Ed. by Harsh V Pant and Rahul Kamath. Special Report, No.173. New Delhi: Observer Research Foundation.

Website

- Basit, Muhammad Abdul. (2021, August 2). The rise of China. Retrieved from <https://www.thenews.com.pk/print/871859-the-rise-of-china>

- Congressional Research Service. (2021). *Tiongkok Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities - Background and Issues for Congress*. Congressional Research Service Report. Retrieved from <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf>
- Chatzky, Andrew, James McBride. (2020, January 28). *China's Massive Belt and Road Initiative*. Retrieved from <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>
- Departement of Foreign Affairs Republic of the Philippines.(2021, September 19). *Statement of Foreign Affairs Teodoro L. Locsin, Jr. on the Australia-United Kingdom-United States (Aukus) Enhanced Trilateral Security Partnership*. Retrieved from <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/29484-statement-of-foreign-affairs-teodoro-l-locsin-jr-on-the-australia-united-kingdom-united-states-aukus-enhanced-trilateral-security-partnership>
- Erickson, Andrew S. (2021, September 20). *Australia Badly Needs Nuclear Submarines*. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2021/09/20/australia-aukus-nuclear-submarines-china/>
- Institute for Essential Services Reform. (2019, March). *Greening the Belt and Road Initiative (BRI): How Indonesia can use BRI to accelerate clean energy infrastructure development*. Briefing Paper. Retrieved from <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Green-Belt-and-Road-Initiative-BRI-IESR-5.pdf>
- Jailani, Abdul Kadir. (2021, September 28). *Indonesia has legitimate reasons to worry about Aussie nuke subs*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/09/28/indonesia-has-legitimate-reasons-to-worry-about-aussie-nuke-subs.html>
- Shugart, Thomas. (2021, August 9). *Australia and the Growing Reach of China's Military*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-and-growing-reach-china-s-military>
- Strangio, Sebastian. (2021, September 17). *What Does the New AUKUS Alliance Mean for Southeast Asia?* Retrieved from <https://thediplomat.com/2021/09/what-does-the-new-aukus-alliance-mean-for-southeast-asia/>
- The Nuclear Threat Initiative. (2020). *Bangkok Treaty: Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone (SEANWFZ) Treaty*. Retrieved from <https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfz-treaty-bangkok-treaty/>
- White House. (2021, September 15). *Joint Leaders Statement on AUKUS*. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/15/joint-leaders-statement-on-aukus/>
- World Bank. (2018, March 29). *BRI at a Glance*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>
- Xuanmin, Lee. (2021, December 15). *GT Exclusive: Myanmar accepts yuan as official settlement currency for border trade with China*. Retrieved from <https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241577.shtml>